

BAB 3

KEHIDUPAN EKSIL INDONESIA PADA 1965-1990

3.1 Kehidupan Sosial Politik Eksil Indonesia tahun 1965-1970

Eksil Indonesia memulai kehidupan yang baru sebagai seseorang tanpa kewarganegaraan sejak peraturan penyaringan berlangsung, mereka berusaha mencari informasi tentang situasi yang sebenarnya terjadi di Indonesia dari berbagai negara yang mereka tempati. Sumber informasi yang mereka dapatkan beragam dengan minimnya alat komunikasi pada saat itu. Eksil Indonesia berusaha mencari informasi tentang apa yang terjadi di tanah air melalui berbagai media yang bisa didapat pada saat itu. Kejadian G30S disusul dengan terputusnya hubungan diplomatik Indonesia dengan Tiongkok, namun Tiongkok tetap bermurah hati menampung Eksil Indonesia yang sudah mereka anggap sebagai tamu mereka.

3.1.1. Penyebaran Informasi G30S dan Keputusan untuk Tidak Kembali

Ratusan (bahkan ribuan) orang Indonesia sedang berada di luar negeri ketika peristiwa G30S terjadi seperti di negara-negara Barat, Albania, Rumania, Cekoslowakia, Kuba Cina, Korea Utara, Vietnam, Mesir, Sri Lanka, dan Tiongkok. Sebagian besar sedang menempuh pendidikan, menjadi staf kedutaan besar Indonesia, dan berpartisipasi dalam berbagai tur budaya. Sejumlah besar meninggalkan Jakarta pada tanggal 27 September 1965 untuk berpartisipasi dalam

perayaan Hari Nasional Tiongkok⁷¹ pada tanggal 1 Oktober 1965.⁷² G30S meletus ketika Tiongkok sedang merayakan hari nasional.⁷³ Masyarakat Indonesia yang berada di Tiongkok kesulitan untuk mencari informasi mengenai apa yang terjadi di Indonesia karena selama 24 jam pertama sinyal radio dari kedutaan Tiongkok di Jakarta terganggu. Sebuah telegram baru tiba pada tanggal 2 Oktober 1965 di Beijing dari kedutaan Jakarta yang mengkonfirmasi bahwa Sukarno selamat.⁷⁴

Berita mengenai G30S juga sampai di telinga WNI di Belgia, setiap hari mereka mendengarkan berita dari radio *reloj* yang menyampaikan berita secara simpang siur dan tidak utuh.⁷⁵ Berita radio menjadi jalur komunikasi paling cepat pada masa itu, namun kantor berita internasional seperti *British Broadcasting Corporation* (BBC) juga belum bisa menyimpulkan secara persis apa yang sebenarnya terjadi mengenai peristiwa G30S tersebut. BBC berusaha melaporkan kondisi yang terjadi beberapa hari setelah kudeta, khususnya kondisi di Jakarta.⁷⁶ WNI di Moskow tidak mendapatkan informasi apapun terlebih Kedutaan Indonesia di Moscow sama sekali tidak memberikan informasi sedikitpun tentang apa yang

⁷¹ Penyebutan Republik Rakyat Tiongkok, China, dan Cina menjadi Tiongkok di dalam skripsi ini sebagaimana Keppres No. 12/2014

⁷² David T. Hill, *Knowing Indonesia From Afar: Indonesian Exiles and Australian Academics*. RIMA: Review of Indonesian and Malaysian Affairs. Volume 43, No. 1, 2009, hlm 151

⁷³ Kurasawa Aiko dan Matsumura Toshio. *op cit* hlm xii

⁷⁴ David T. Hill, *Cold War Polarization, Delegated Party Authority, and Diminishing Exilic Options: the Dilemma of Indonesian Political Exiles in China after 1965*. Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia. Volume 176, No. 2, 2020, hlm 343

⁷⁵ Syarkawi Manaf, *op cit* hlm 47

⁷⁶ Amin Mudzakkir, *op cit* hlm 174

sedang terjadi di Jakarta.⁷⁷ Dua sumber yang sangat terbatas mereka dapatkan dari Jenderal Suhario Padmowidiry⁷⁸ yang mengatakan bahwa Jenderal Ahmad Yani dan beberapa jenderal yang lainnya telah hilang. Informasi yang lebih jelas baru didapatkan dari koran harian *Izvestia* yang berisi tentang analisis detail mengenai kudeta dan kemunculan gerakan antikomunis di Indonesia. Siaran-siaran radio luar negeri yang dapat ditangkap di negara yang Eksil Indonesia tempati seperti Radio Australia, Amerika, Jepang, Taiwan, dan Tiongkok selalu mereka simak agar mendapat informasi lebih lanjut mengenai situasi yang terjadi di tanah air.⁷⁹ dengan Masyarakat Indonesia berusaha mengumpulkan rincian apapun yang dapat mereka peroleh dari kontak lokal mereka.

Djawoto⁸⁰ yang sedang berada di Tiongkok ketika peristiwa G30S terjadi berkali-kali mengirim kawat meminta penjelasan mengenai peristiwa G30S kepada Departemen Luar Negeri dan Presiden Sukarno, namun tidak ada jawaban kemudian kawat untuk Djawoto datang berkali-kali dari Jakarta meminta ia pulang untuk konsultasi rutin dan Djawoto menolaknya karena khawatir keselamatannya tidak terjamin dengan alasan resmi untuk kepulangannya yang tidak diberikan, namun Djawoto dipanggil kembali untuk memberikan laporan mengenai liputan

⁷⁷ Wahyudi Akmaliah, *Indonesia yang dibayangkan: Peristiwa 1965-1966 dan Kemunculan Eksil Indonesia*. Jurnal Masyarakat dan Budaya. Volume 17, No. 1, 2015, hlm 70

⁷⁸ Jenderal Suhario Padmowidiry^o merupakan mantan Komandan Militer Region Kalimantan yang dikenal sebagai Hario Kecik. Pada saat itu ia sedang ditugaskan oleh Presiden Sukarno untuk melakukan studi di Soviet War College.

⁷⁹ Waloejo Sedjati, *Bumi Tuhan: Orang Buangan di Pyongyang, Moskwa, dan Paris (1960-2013)*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2013, hlm 171

⁸⁰ Djawoto merupakan Duta Besar Republik Indonesia untuk RRC dan Mongolia

tentang Indonesia melalui media publisitas Tiongkok. Pihak Tiongkok memberikan nasehat untuk tidak pulang dan tetap berada di Tiongkok, Djawoto juga memberikan saran kepada WNI di Tiongkok untuk tidak terburu-buru pulang dan memantau perkembangan terlebih dahulu. Tindakan yang dilakukan Djawoto ditanggapi oleh pemerintah Indonesia dengan mencabut kewarganegaraannya.⁸¹

Pemerintah Tiongkok berbaik hati untuk menampung tamu-tamu Indonesia dalam jangka waktu yang panjang. Kementerian Luar Negeri Indonesia memanggil Duta Besar Indonesia di Asia ke Bangkok untuk memberikan arahan pada akhir tahun 1965, Djawoto tidak hadir dan mengirimkan wakilnya. Kabar mengenai nasib orang-orang yang kembali ke Indonesia telah tersebar, seperti anggota Komite PKI Wikana, yang ditangkap saat tiba di Indonesia pada tanggal 10 Oktober dan setelah itu dikabarkan ia telah menghilang.⁸² Mantan Ketua MPRS Chairul Saleh dan mantan Wakil Ketua MPRS Ali Sastroamidjojo memberanikan diri pulang meskipun keadaan Indonesia tengah dilanda arus teror dan pengejaran terhadap orang-orang kiri dan para penyokong Sukarno. Chairul Saleh ditahan dan meninggal dalam tahanan penjara Orba.⁸³ Awal Uzhara, seorang mahasiswa yang telah menyelesaikan kuliahnya di Moskow pulang ke Indonesia pada tahun 1966 dan sehari-hari dijejali pertanyaan oleh pemerintah berkaitan dengan G30S.⁸⁴ Berita tersebut menyoroti risiko bagi kelompok kiri beserta simpatisannya untuk kembali ke Indonesia. Kabar mengenai pembunuhan beberapa jenderal angkatan

⁸¹ “*Ex-ambassadeur Djawoto verlist nationaliteit*”. De Tijd, 19 April 1966

⁸² David T. Hill. *op cit* hlm 343

⁸³ Ibrahim Isa, *op cit* hlm 188

⁸⁴ Syarif Maulana, *Nasib Manusia: Kisah Awal Uzhara, Eksil di Rusia*. Bandung: Ultim, 2021, hlm 66

darat dan pembunuhan massal terhadap para anggota dan simpatisan PKI juga sudah terdengar hingga Eropa, namun motif di balik peristiwa itu tetap samar.⁸⁵ Mereka semua bahkan tidak mendapatkan kejelasan mengenai terbunuhnya D. N Aidit.

WNI yang tidak memutuskan untuk segera pulang ke Indonesia ketika G30S terjadi, bukan hanya di Tiongkok saja. Oemar Said yang merupakan bekas pemimpin redaksi koran kiri Ekonomi Nasional sedang berada di Aljazair ketika G30S meletus untuk mempersiapkan Konferensi Wartawan Asia Afrika (KWAA) ke-2, ia memutuskan untuk tidak langsung pulang ke Indonesia terlebih adanya kabar bahwa koran-koran kiri termasuk korannya sendiri dibrendel pemerintah, juga sejumlah wartawan ditangkap. Oemar Said yang mendengar banyaknya jurnalis yang ditangkap ikut menandatangani pernyataan yang mengutuk dan memprotes tindakan yang tidak manusiawi terhadap jurnalis yang dipenjara bersama dengan tujuh belas jurnalis Indonesia di luar negeri.⁸⁶ Oemar Said pergi ke Beijing dan bergabung dengan Djawoto. Beijing telah menjadi tempat pelarian bagi eks PKI yang saat G30S terjadi sedang berada di luar negeri.

Kedutaan-kedutaan yang bersahabat mulai menjadi bermusuhan ketika militer memainkan peran yang berpengaruh dalam menyaring setiap orang Indonesia berdasarkan latar belakang ideologi individu dan keluarga mereka. Proses penyaringan dimulai pada tahun 1966. Sarmadji termasuk dalam warga Indonesia yang dipanggil ke kedutaan untuk ditanyai kesetiiaannya pada rezim baru

⁸⁵ Amin Mudzakkir. *op cit* hlm 174

⁸⁶ “*Driehonderd Indonesische Journalisten in Arrest*”. *Algemeen Handelsblad*, 1 Maret 1966

yang tengah berkuasa, ia dengan terang-terangan menolak dan kehilangan paspornya. Sarmadji langsung membuat laporan pada sekolahnya mengenai paspornya, ia justru ditanyai apakah ingin meneruskan sekolah atau berangkat ke negara lain. Sarmadji memutuskan untuk meneruskan sekolahnya hingga ia lulus. Syarkawi Manaf, mahasiswa Indonesia di Kuba juga tetap melanjutkan pendidikannya dengan dibantu oleh Dubes A. M. Hanafi yang setelah peristiwa G30S terjadi, ia diberhentikan dari jabatannya.⁸⁷

Negara-negara yang Eksil Indonesia tempati memberikan mereka suaka, dengan tidak adanya kewarganegaraan yang Eksil miliki tidak menghalangi tuan rumah untuk memberikan bantuan termasuk juga bantuan yang diberikan simpatisan partai komunis setempat untuk mereka. Beberapa Eksil ada juga yang harus memperjuangkan suaka dan keamanan mereka. Mawie menjadi salah satu dari Eksil yang berusaha untuk mendapatkan suaka.⁸⁸ Ia merupakan mahasiswa olahraga yang ketika paspornya dicabut, ia mendekati Akademi Olahraga untuk meminta bantuan suaka politik dan menulis permintaan ini kepada bagian pelajar internasional di Kementerian Urusan luar negeri. Para pelajar yang mencari suaka diperlakukan sebagaimana pengungsi. Para pelajar juga tetap bisa melanjutkan pendidikan mereka meskipun tidak ada kejelasan dalam status kewarganegaraan mereka.

WNI di Tiongkok terancam kehilangan tanah air dan lebih-kurang 200 orang dicabut paspornya di Beijing. Mereka dihadapkan pada pilihan terbatas, pulang

⁸⁷ Syarkawi Manaf. *op.Cit* hlm 49

⁸⁸ David T. Hill. *op cit* hlm 345-346

sesuai instruksi Kedutaan Besar Indonesia atau tinggal di Tiongkok dengan bantuan dari tuan rumah, Tiongkok menganggap mereka sebagai “Tamuh Partai”.⁸⁹ Sebagai “tamuh”, pemerintahan Tiongkok akan menanggung semuanya termasuk makan, tempat tinggal, pengobatan, dan transportasi untuk jangka waktu yang panjang. Kehidupan yang telah terjamin oleh negara yang Eksil Indonesia tempati tidak lepas dari masa depan mereka yang tidak pasti. Mereka memerlukan waktu berminggu-minggu yang penuh dengan kecemasan untuk memahami situasi dan dampak dari peristiwa politik yang terjadi.⁹⁰

Kadir Soelardjo yang merupakan mahasiswa kedokteran aktivis konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) yang sedang berada di Tiongkok diberitahukan bahwa jika tak ingin keluar dari Tiongkok, ia diperbolehkan untuk hidup disana dan diperbolehkan juga untuk menjadi warga negara Tiongkok dengan syarat tidak melakukan aktivitas politik. Mahasiswa Indonesia di Kuba mendapatkan perlindungan dari Direktur sekolah tempat mereka menimba ilmu. Direktur tersebut terus mengikuti perkembangan tentang apa yang terjadi terhadap murid Indonesiannya dan mengatakan bahwa tidak boleh terjadi sesuatu yang buruk terhadap muridnya.⁹¹ Pejabat-pejabat Kuba memperhatikan dan bertanggung jawab terhadap mahasiswa Indonesia bahkan semenjak mereka datang ke Kuba, dan perhatian tersebut semakin besar ketika G30S terjadi.

Nasib para Eksil Indonesia berbeda di setiap negaranya, banyak juga dari mereka yang tidak memiliki uang karena terputusnya beasiswa dari pemerintah

⁸⁹ Kurasawa Aiko dan Matsumura Toshio. *op cit* hlm xiii

⁹⁰ *Ibid*, hlm 151

⁹¹ Syarkawi Manaf. *op cit* hlm 56

Indonesia atau dari lembaga yang memberikan beasiswa di tengah tidak adanya kepastian perlindungan di negara tempat Eksil Indonesia belajar. Eksil Indonesia di Australia juga mendapat perlakuan berbeda dengan Eksil Indonesia di negara lain, kurangnya perhatian baik oleh media, politisi atau akademisi Australia kepada Eksil Indonesia disana.⁹² Beberapa akademisi Australia memang memainkan peran yang sederhana yang cenderung bersifat pribadi dan individual. Mereka sangat membantu beberapa Eksil Indonesia untuk membangun kembali kontak dengan keluarga mereka di Indonesia karena untuk mengetahui kabar keluarga para Eksil sangat sulit, biaya menelpon mahal dan tidak semua rumah di Indonesia memiliki telpon rumah pada saat itu. Percakapan juga bisa didengar dan disadap sehingga membahayakan sanak saudara mereka di Indonesia.

Revolusi kebudayaan meletus di Tiongkok pada tahun 1966 Eksil Indonesia terkena dampak dari Revolusi Kebudayaan Tiongkok, Eksil Indonesia awalnya tinggal di sebuah hotel di Beijing, kemudian sebagian dipindahkan ke Nanjing karena akomodasi yang terbatas di Beijing. Mereka ditempatkan di perumahan akademi militer dengan fasilitas gratis yang didapatkan. Eksil Indonesia mendapatkan kewajiban untuk belajar politik selama setahun serta mendapat 15 Yuan per bulan. Mereka semua tanpa terkecuali diharuskan mempelajari kesalahan-kesalahan partai di waktu yang lalu termasuk kesalahan partai ketika peristiwa G30S terjadi, dalam pembelajaran tersebut mereka terbagi menjadi regu-regu.⁹³

⁹² David T. Hill. *op cit* hlm 155-156

⁹³ Utuy Tatang Sontani, *Di Bawah Langit tak Berbintang*. Jakarta: Pustaka Jaya. 2001, hlm 93-94

Eksil Indonesia di Tiongkok tidak mendapatkan kebebasan bahkan untuk sekedar berinteraksi dengan warga lokal.

Eksil Indonesia di Tiongkok tidak hanya ditempatkan di Nanjing, sebagian dari mereka juga ditempatkan di Nan Cang. Nan Cang berada di pedalaman Dataran Danau Poyang. Eksil Indonesia menempati rumah di Nan Cang yang bisa menampung 200 orang lebih dan tetap mendapatkan fasilitas selama mereka menjadi Delegasi, namun mereka juga mendapatkan perlakuan diskriminatif,⁹⁴ mereka hanya mendapatkan 15 Yuan per bulan, jauh berbeda ketika Eksil Indonesia yang sebelumnya berstatus mahasiswa dalam per bulan nya mendapatkan 100 Yuan. Eksil Indonesia di Tiongkok memang mendapatkan dukungan kesejahteraan bagi kehidupan mereka, namun mereka juga harus menerima ketika pemerintahan Tiongkok yang akan menentukan dimana mereka tinggal termasuk apa yang harus mereka lakukan. Revolusi Kebudayaan bagi Eksil Indonesia merupakan situasi yang tidak sehat dikarenakan mereka terisolasi dan tidak diperbolehkan untuk berhubungan dengan penduduk setempat.

3.1.2. Pemutusan Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Tiongkok

Indonesia dan Tiongkok memiliki hubungan yang cenderung berfokus pada empat tema: diplomasi; pertukaran budaya; evolusi Partai Komunis Indonesia; dan komunitas Tionghoa di Indonesia. Indonesia termasuk negara pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok setelah berdirinya negara tersebut pada tahun 1949. Hubungan tersebut memburuk ketika Tiongkok tertuduh ikut

⁹⁴ Martin Aleida. *op cit* hlm 59

andil dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965, Angkatan Darat Indonesia menuduh pemerintah Tiongkok telah menyeludupkan senjata kepada PKI untuk melancarkan aksi G30S.⁹⁵ Angkatan Darat juga mengatakan bahwa G30S direncanakan dan diatur rezim Beijing sebagai salah satu bagian dari konsep revolusi dunia.⁹⁶ Gagasan bahkan tuduhan akan adanya campur tangan Beijing dalam peristiwa G30S terjadi pada akhir 1965. Beijing yang mulai menentang secara terbuka pemerintahan Soeharto dengan melakukan siaran Radio yang mengutuk militer Indonesia membuat Angkatan Darat Indonesia semakin menggambarkan keterlibatan Tiongkok di balik peristiwa G30S.⁹⁷

Ketegangan meningkat seiring dengan pecahnya wabah anti-Tionghoa di Indonesia, termasuk serangan destruktif terhadap kedutaan Tiongkok yang dilakukan oleh sekitar 2.000 demonstran. Tiongkok menanggapi dengan melakukan demonstrasi anti-Indonesia di Beijing, ratusan pemuda Tiongkok menempeli poster-poster anti-Indonesia di KBRI. Para staf KBRI diperlakukan kasar di daerah tempat tinggal mereka setelah adanya rapat umum anti-Indonesia pada tanggal 27 April 1967. Rapat umum tersebut dihadiri sekitar 100.000 orang di stadion Buruh Beijing.⁹⁸ Indonesia kemudian mengusir dua diplomat Tiongkok pada tanggal 27

⁹⁵ Kurasawa Aiko dan Matsumura Toshio. *op cit* hlm 1

⁹⁶ “Kisah Gagalnya Gestapu yang Dimasak di Beijing, Rezim Beijing perintahkan bunuh? Djenderal & Semua Perwira ‘Reksioner’, RRT sanggup pengiriman sendjata & perlengkapan sendajatnya untuk 30.000 orang” *Angkatan Bersendjata*, 25 April 1966

⁹⁷ Taomo Zhou, *Revolusi, Diplomasi, Diaspora: Indonesia, Tiongkok, dan Etnik Tionghoa, 1945-1967*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2019, hlm 385-386

⁹⁸ Agus Haryanto dan Isman Pasha. *op cit* hlm 145

April 1967. Tiongkok melakukan hal yang sama dengan mengusir penanggung jawab sementara bisnis Baron Sutadisastra.⁹⁹

Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik sangat ingin menjaga hubungan baik dengan Indonesia dengan Tiongkok, namun pada 9 Oktober 1967 Indonesia mendeklarasikan pembekuan hubungan. Ribuan etnis Tionghoa mengungsi dari Indonesia ke Tiongkok setelah serangan anti-Tiongkok terjadi. Kebijakan Tiongkok terhadap Indonesia berubah menjadi sangat bermusuhan ketika Soeharto memperketat cengkramannya pada kekuasaan politik di Indonesia melalui pembersihan komunis tanpa henti.¹⁰⁰ Beijing kemudian mengumumkan penangguhan hubungan dengan Indonesia pada 28 Oktober 1967. Hubungan Indonesia-Tiongkok yang telah lama terjalin harus terputus. Kepentingan Indonesia di Beijing kemudian diurus oleh Kedutaan Besar Kamboja, sementara kepentingan Tiongkok di Jakarta dilakukan oleh Kedutaan Besar Rumania.¹⁰¹

3.2 Perjalanan Perpindahan ke Negara-negara Eropa Barat tahun 1971-1980

Eksil Indonesia terus menjalani kehidupan mereka di negara tuan rumah masing-masing sampai sekitar tahun tujuh puluhan ketika terjadi kekacauan politik, mereka memutuskan untuk pindah ke negara-negara Eropa Barat seperti Swedia,

⁹⁹ Baron Sutadisastra ditetapkan sebagai Kuasa Usaha (KUI) Indonesia dan sering dipanggil ke Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada waktu-waktu di luar kebiasaan diplomatik

¹⁰⁰ Taomo Zhou, *Ambivalent Alliance: Chinese Policy Towards Indonesia, 1960-1965*. The China Quarterly. Volume 221, 2015, hlm 224

¹⁰¹ *Ibid*, 146-147

Jerman, Prancis, dan Belanda.¹⁰² Orde baru yang mulai benar-benar menguasai seluruh Indonesia selama bertahun-tahun mendorong Eksil Indonesia untuk menyesuaikan diri lebih jauh dengan negara tempat tinggal mereka dan mempertimbangkan untuk pindah ke negara-negara barat. Sebagian besar Eksil Indonesia berjuang untuk menemukan tujuan mereka, dan harus memusatkan waktu dan upaya mereka membangun mata pencaharian untuk menafkahi keluarga dan hari tua mereka.¹⁰³

Eksil Indonesia yang bermukim di Tiongkok secara berangsur-angsur dan sedikit demi sedikit meninggalkan Tiongkok sejak tahun 1971 menuju ke negeri-negeri lain. Banyak sekali negara yang dituju oleh Eksil Indonesia seperti Hongkong, Canada, Uni Soviet, Jerman Timur, Aljazair, dan Kuba. Eksil Indonesia umumnya meminta suaka politik ke Belanda, Jerman Barat, Denmark, Swedia, Belgia, dan Prancis. Keinginan terbesar Eksil Indonesia adalah kembali pulang ke tanah air. Mereka menghadapi ironi yang sangat pahit untuk mendapatkan tempat tinggal yang aman. Eksil Indonesia tidak siap menghadapi konfrontasi dengan realitas rezim sosialis dan kebanyakan dari mereka menderita karena kondisi yang mereka jalani meski sebelumnya telah mendapatkan pelajaran mengenai situasi perpecahan dalam Gerakan Komunis Internasional.¹⁰⁴

Eksil Indonesia secara umum menghabiskan waktu lima belas tahun sebagai pengungsi di berbagai negara Asia sebelum mencapai tempat pengungsian terakhir

¹⁰² Ibnu Nadzir, *Reclaiming Indonesia-Ness: Online and Offline Engagement of Indonesia Exiles in Netherland*. Jurnal Masyarakat Indonesia. Volume 44, No. 1, 2018, hlm 16

¹⁰³ David T. Hill. *op cit* hlm 39

¹⁰⁴ Syarkawi Manaf. *op cit* hlm 20

mereka di Eropa. Perpindahan yang dilakukan Eksil Indonesia memiliki tujuan tertentu, seperti sastrawan Indonesia yang termasuk ke dalam kelompok Eksil memutuskan untuk pergi ke Eropa Barat pada akhir tahun 1980an karena disana memungkinkan mereka untuk terus berkarya dan menerbitkannya dengan cara yang lebih terstruktur.¹⁰⁵ Situasi sulit terjadi di Tiongkok karena Revolusi Kebudayaan sejak 1966 yang membuat sebagian dari Eksil Indonesia berusaha lari ke Eropa Barat. Belanda menjadi tempat tinggal terakhir dari semua negara barat yang dipilih oleh Eksil Indonesia karena Belanda menjadi satu-satunya negara yang terus memberikan dukungan institusional dan moneter yang cukup untuk Eksil Indonesia.

Belanda menjadi harapan bagi beberapa Eksil yang telah kehilangan kontak dengan keluarga mereka di Indonesia. Eksil Indonesia berharap jika mereka tinggal di Belanda akan memudahkan mereka untuk berhubungan kembali dengan keluarga mereka melalui jaringan pertemanan. Belanda juga dipilih dengan alasan sejarah hubungan kedua negara yang menjadi hubungan keakraban bagi Eksil Indonesia yang lahir pada tahun 1920-an dan 1930-an karena menjadi warga koloni Belanda di Hindia Belanda, dan pernah belajar bahasa Belanda di sekolah.¹⁰⁶ Berdasarkan Undang-Undang tahun 1848, penduduk koloni Belanda, seperti Hindia Belanda, dianggap sebagai warga Kerajaan Belanda. Eksil Indonesia yang lahir sebelum pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda pada tahun 1949 dapat

¹⁰⁵ Dorothea Schaefer, *Indonesian Literature in Exile, 1965-1998*. The Newsletter. Nomor 52, 2009

¹⁰⁶ Henri Chambert-Loir, *Locked Out: Literature of the Indonesian Exiles Post-1965*. Archipel. Études interdisciplinaires sur le mode insulindien. No. 91, 2016, hlm 122

memperoleh tempat tinggal dan kewarganegaraan tanpa perlu mengajukan permohonan suaka politik. Eksil Indonesia yang baru tiba di Belanda akan ditampung di sebuah asrama milik gereja. Mereka belajar bahasa Belanda bersama dengan sesama pengungsi dari Irian dan negara-negara Afrika.¹⁰⁷

Perpindahan ke negara-negara Barat terjadi pertama kali di kalangan Eksil Indonesia yang tinggal di Tiongkok. Sebagian Eksil Indonesia di Cekoslowakia menganggap perpindahan ke negara-negara Barat setara dengan menjadi orang asing, mereka telah menyesuaikan diri sebagai bagian dari negara Ceko dengan melakukan pernikahan dengan perempuan Ceko.¹⁰⁸ Kebanyakan Eksil Indonesia di Ceko dan Hongaria menghadapi kesulitan untuk melakukan perjalanan ke negara-negara Barat, mereka akan menumi masalah dengan polisi perbatasan, perlu menghabiskan waktu berjam-jam di kantor polisi karena mereka tidak menerima dokumen yang bisa menjelaskan status mereka yang tanpa kewarganegaraan.¹⁰⁹ Eksil Indonesia di Ceko mulai dengan mudah melakukan perjalanan ke negeri-negara Barat setelah tahun 1989. Kehidupan Eksil Indonesia di Republik Ceko dan Uni Soviet sebagian besarnya bekerja sebagai pegawai negeri. Mereka bekerja sebagai pejabat pemerintah dan aktif terlibat dalam situasi politik dan sosial dari negara yang mereka tempati. Keterbatasan mereka sebagai orang yang tidak

¹⁰⁷ Suradi, Safrudiningsih, Sjailendra, *Dilema Eksil; Tetap di Luar Negeri atau Pulang ke Tanah Air*. Journal Visioner: Journal of Media and Art. Volume 3, No. 1, 2023, hlm 63

¹⁰⁸ Bambang Alfred Sipayung, *Exiled Memories: The Collective Memory of Indonesian 1965 Exiles*. Doctoral dissertation, MA thesis. (Institute of Social Studies Erasmus University of Rotterdam, The Hague. 2011), hlm 18

¹⁰⁹ Sita Magfira, *Witnessing State Socialism: The Lives of Indonesian Diaspora, Hungary-Czechoslovakia, 1950s-1989*. Doctoral dissertation, MA thesis. (Department of History Tokyo University of Foreign Studies. 2022), hlm 79

memiliki kewarganegaraan tidak menghalangi mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.¹¹⁰

Banyak Eksil Indonesia yang berada di pengasingan politik memilih untuk tinggal di negara lain karena pilihan atau keadaan, dan sejumlah besar tinggal di Prancis dan Swedia karena kebijakan dua negara tersebut terhadap pengungsi.¹¹¹ Prancis yang merupakan salah satu negara pelopor HAM menempatkan negara tersebut sebagai tujuan para pencari suaka baik pengungsi maupun pelarian politik,¹¹² sementara Swedia merupakan salah satu negara yang menunjukkan dukungannya terhadap imigran yang masuk ke Eropa.¹¹³ Dalam semua kasus yang diketahui, gelombang imigrasi di Eropa merupakan proses yang mudah. Pengungsi baru tentu mengalami kesulitan materi, tidak satupun dari mereka mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan kompetensi mereka, namun semuanya mendapatkan suaka politik di negara pilihan mereka, mendapat dukungan oleh pemerintah setempat, dan setelah jangka waktu yang bervariasi Eksil Indonesia mendapatkan kewarganegaraan negara tuan rumah.

Eksil Indonesia mulai mempelajari kemungkinan-kemungkinan atau mencari jalan dan mengadakan persiapan-persiapan, termasuk memalsukan cap KBRI untuk paspor dan mengarang nama petugas yang memperpanjangnya. Cap palsu yang

¹¹⁰ Bambang Alfred Sipayung. *op cit* hlm 17

¹¹¹ David T. Hill, *Indonesian Political Exiles in the Netherlands after 1965: Postcolonial Nationalists in an Era of Transnationalism*. *Journal of the Humanities of Indonesia*. Volume 23, No. 3, 2022, hlm 599

¹¹² Wahyuddin, Irianti Bandu, Muhammad Hasyim, *Kebijakan dan Politik Integrasi Imigran di Prancis*. *Jurnal Ilmu Budaya*. Volume 9, No. 2, 2021, hlm 126

¹¹³ Tiffany Setyo Pratiwi, *Sekuritisasi Penanganan Isu Pengungsi di Swedia: Berhasil atau Gagalkah?*. *Dauliyah*. Volume 3, No. 2, 2018, hlm 228

dibuat menggunakan singkong yang diukir.¹¹⁴ Para Eksil Indonesia berhasil melakukan hal tersebut karena petugas-petugas imigrasi di berbagai negeri tidak mengetahui apakah cap yang ada dalam paspor tersebut palsu atau asli, namun mereka tetap dihantui perasaan tidak aman karena menggunakan paspor yang tidak sah termasuk dalam pelanggaran hukum. Transportasi yang digunakan oleh Eksil Indonesia sangat beragam, Eksil Indonesia di Tiongkok yang ingin pergi ke Eropa Barat menggunakan kereta api Trans Siberia dengan waktu 7 hari perjalanan mereka baru akan sampai di Moskow, sebagian berhenti dan memutuskan untuk tinggal di Moskow dengan fasilitas yang disediakan tuan rumah sebagai bekas partai sekawan.¹¹⁵ Sebagian besar Eksil Indonesia di Tiongkok memilih pergi ke Eropa Barat dan tidak ada seorang pun yang mau pergi ke Uni Soviet karena permusuhan antara Tiongkok dan Uni Soviet pada saat itu. Eksil Indonesia sejak awal tahun 1970an hingga tahun 1982 setidaknya ada tiga atau empat orang akan berangkat ke Barat.¹¹⁶ Migrasi berantai terjadi ketika salah satu Eksil Indonesia berhasil menetap, migrasi berantai merupakan pilihan seseorang atas tujuan akhir yang dipengaruhi oleh pengetahuan bahwa ada Eksil Indonesia yang sudah tinggal disana.

Eksil Indonesia dapat memasuki negara penerimanya secara sah, namun kebanyakan menganggapnya sebagai stasiun perantara dalam perjalanan ke negara lain, dan bukan sebagai tujuan akhir, seperti yang dilakukan oleh Titiana Lukman

¹¹⁴ Martin Alieda. *op cit* hlm 25

¹¹⁵ Alex Supartono dan Lisabona Rahman, *Studi Indonesia di Rusia: Sebuah Rumah Sejarah yang Alpa Disinggahi*. 2001, hlm 10-11

¹¹⁶ David T. Hill. *op cit* hlm 361

yang melanjutkan studinya ke Tiongkok pada tahun 1964. Titiana pindah ke Kuba pada tahun 1974, ia mengajar di Havana selama 12 tahun setelah menyelesaikan gelar sarjana bahasa Spanyol dan Prancis nya. Titiana kemudian bermigrasi ke Belanda.¹¹⁷ Hal serupa juga dilakukan oleh Syarkawi Manaf yang ketika peristiwa G30S terjadi sedang belajar di Kuba, dari Kuba ia pergi ke Vietnam dan diberi kesempatan belajar di negeri tersebut atas bantuan Pemerintah Demokrasi Republik Vietnam, kemudian ia pergi ke Tiongkok selama 4 tahun dan pindah ke Birma¹¹⁸ untuk bekerja, Syarkawi Manaf juga sempat kembali ke Tiongkok sebelum akhirnya memutuskan menetap di Swedia. Eksil Indonesia menganggap lintasan pengasingan sebagai status sementara karena mereka masih mengharapkan perubahan politik Indonesia.

3.3 Kehidupan Eksil Indonesia tahun 1981-1990

Tahun 1990 merupakan tahun dibukanya kembali hubungan diplomatik Indonesia dengan Tiongkok. Soeharto mengambil keputusan ini dengan hati-hati sehingga ada beberapa tuntutan yang ia berikan kepada pemerintahan Tiongkok yang pada saat itu masih memberikan perlindungan kepada Eksil Indonesia. Tuntutan yang Soeharto berikan memberikan banyak pengaruh pada Eksil Indonesia khususnya mereka yang tinggal di Tiongkok. Soeharto juga memberikan kesempatan kepada Eksil Indonesia untuk bisa pulang ke tanah air mengingat usia mereka yang sudah renta dan tidak muda lagi tidak seperti keberangkatan mereka

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ Sekarang berubah menjadi Myanmar

dahulu ke luar negeri. Kesempatan untuk pulang yang diberikan oleh Soeharto diiringi dengan persyaratan yang harus Eksil Indonesia penuhi.

3.3.1 Pemulihan Hubungan Diplomatik dengan Tiongkok dan Nasib Eksil Indonesia setelah pemulihan

Hubungan Indonesia dengan Tiongkok mencair pada tahun 1985 dengan adanya penandatanganan memorandum kesepahaman yang dilakukan untuk memulihkan hubungan perdagangan.¹¹⁹ Hubungan perdagangan tersebut berawal dari diperbolehkannya hubungan dagang dengan pihak swasta pada akhir tahun 1984, meski hubungan diplomatik masih dibekukan. Sikap pemerintah Indonesia yang mulai melunak terlihat sejak tahun 1982, saat itu para atlet Tiongkok diperbolehkan mengikuti pertandingan internasional Jakarta. Pembukaan hubungan diplomatik berlangsung bertahap untuk menjaga sejarah gelap 1965. Normalisasi hubungan Indonesia-Tiongkok tersendat-sendat terlebih dengan adanya perasaan anti-orang Tiongkok yang masih ada meski secara tersirat. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wu Xueqian di tahun 1985 datang ke Jakarta untuk ikut merayakan ulang tahun ketiga puluh konferensi Bandung. Partai Komunis Tiongkok juga tidak lagi mengirimkan ucapan selamat pada hari jadi PKI.

Pemerintahan Indonesia bersedia mengadakan kembali hubungan dengan pemerintah Tiongkok dengan beberapa tuntutan yang harus dilakukan oleh pemerintah Tiongkok. Tuntutan pertama yaitu tidak mencampuri urusan dalam

¹¹⁹ Bakti Putra Dwivianto, *Pengaruh Kebijakan Mengenai Etnis Tionghoa di Indonesia era Pemerintahan Abdurrahman Wahid terhadap Hubungan Bilateral Indonesia dan Tiongkok*. Jurnal Analisis Hubungan Internasional. Volume 5, No. 2, 2016, hlm 476

negeri Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip Dasasila Bandung, tututan kedua adalah kesepakatan pembayaran utang Indonesia dari masa pemerintahan Sukarno yang menurut klaim Tiongkok jumlahnya mencapai lebih dari US\$ 50 juta dibayar dengan minyak mentah, karet, kayu, pupuk, dan berbagai komoditi, tututan ketiga yaitu tidak adanya lagi perlindungan yang dilakukan oleh pemerintahan Tiongkok terhadap orang-orang PKI yang masih tinggal di Tiongkok. Pemerintahan Tiongkok yang pada saat itu sedang memusatkan negaranya pada perbaikan ekonomi bersedia untuk memperhatikan tuntutan tersebut.

Eksil Indonesia dianggap sebagai penghalang bagi pemulihan hubungan diplomatik Tiongkok dan Indonesia. Sebagian besar dari ratusan Eksil Indonesia yang sebelumnya berlindung di Tiongkok memutuskan untuk pergi atas keinginan mereka sendiri dan juga memutuskan pergi karena adanya dorongan dan bantuan dari pemerintahan Tiongkok agar bisa memuluskan jalan untuk normalisasi hubungan diplomatik. Pejabat di Departemen Luar Negeri Tiongkok, Xie Zhi Qiong mendatangi tempat tinggal para Eksil Indonesia untuk memberikan arahan agar Eksil Indonesia pergi ke negara lain, ia menganjurkan pergi ke Eropa demi masa depan yang lebih baik terutama untuk anak-anak dari Eksil Indonesia sendiri.¹²⁰ Bantuan dari Tiongkok umumnya terbatas pada tiket sekali jalan dan jumlah sekitar US\$20. Eksil Indonesia yang telah siap untuk pergi hanya cukup memberitahu Delegasi¹²¹ untuk menyampaikan permintaan mereka beserta alasan

¹²⁰ Syarkawi Manaf, *op cit* hlm 177

¹²¹ Delegasi dijelaskan lebih lengkapnya dalam BAB 4

dan tujuan pilihan mereka kepada Tiongkok sehingga mereka dibelikan tiket dan dana perjalanan (antara US\$300 dan US\$700 per orang).¹²²

Menteri Luar Negeri Tiongkok Qian Qichen bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Murdiono pada tahun 1989, ia menekankan penolakan Tiongkok terhadap PKI dan menyatakan bahwa Tiongkok tidak memiliki hubungan dengan PKI. Presiden Soeharto dalam pidato pertanggungjawaban di MPR mengatakan bahwa Tiongkok telah bersedia hidup berdampingan secara damai dengan Indonesia, dan tidak akan membantu cita-cita dari sisa-sisa PKI disini.¹²³ Jalan menuju normalisasi hubungan diplomatik semakin membaik setelah kunjungan Menlu Ali Alatas ke Baijing yang menjadi kunjungan pertama Menteri Luar Negeri RI setelah 25 tahun terakhir.¹²⁴ Pemulihan hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok berhasil pada tanggal 8 Agustus 1990, Indonesia dan Tiongkok menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) mengenai pemulihan kembali hubungan diplomatik. Bendera Tiongkok secara resmi berkibar di Indonesia yang menandai dibukanya kembali kedutaan Tiongkok di Jakarta.¹²⁵

Upaya pemulihan hubungan antara Tiongkok dan Indonesia menimbulkan ketidakpastian besar bagi Eksil.¹²⁶ Pemulihan hubungan diplomatik berpengaruh

¹²² David T. Hill, *op, Cit* hlm 361

¹²³ Pusat Data dan Analisis Tempo, *Tonggak Penting Hubungan Diplomasi Indonesia Cina di Periode Awal Pemerintahan Presiden Soeharto*. Jakarta: TEMPO Publishing. 2022, hlm 44

¹²⁴ “*Peking Herstelt Diplomatieke Betrekikingen Met Jakarta*”. Buitenland, 4 Juli 1990

¹²⁵ Pusat Data dan Analisis Tempo, *Cina Terlibat atau Tidak dengan Peristiwa Makar G30S/PKI*. Jakarta: TEMPO Publishing. 2022, hlm 46

¹²⁶ Vanessa Hearman, *The Last Men in Havana: Indonesian Exiles in Cuba*. Review of Indonesian and Malaysian Affairs. Volume 44, No. 1, 2010, hlm 91

terhadap Eksil Indonesia. Mereka dianggap sebagai hambatan. Sobron Aidit yang memiliki koneksi baik kehilangan kontrak kerjanya dengan Radio Beijing.¹²⁷ Pemutusan kontrak kerja terjadi pada tanggal 3 Agustus 1981 yang baru diketahui oleh Sobron Aidit pada rapat saat tanpa ada kejelasan terlebih dahulu dan hanya ada putusan akhir yang berlaku.¹²⁸ Pihak Radio Beijing hanya memberikan kesempatan Sobron Aidit untuk berpikir dan masih memberikan setengah gajinya. Tokoh-tokoh PKI di Beijing kemudian diperlakukan sebagai individu, bukan lagi sebagai anggota partai Komunis persaudaraan. Mereka dihadapkan untuk tetap tinggal di Tiongkok sebagai warga negara Tiongkok atau pindah ke negara lain.¹²⁹

3.3.2 Keputusan Soeharto terhadap Eksil Indonesia Pasca Pemulihan Hubungan Diplomatik dengan Tiongkok

Peristiwa demi peristiwa terjadi pada Eksil Indonesia hingga akhirnya bekas-bekas PKI di Tiongkok pada tahun 1990 yang jumlahnya sekitar 200 orang pergi ke Eropa Barat karena disana lebih mudah berhubungan dengan keluarga. Beberapa yang masih tinggal hanya mereka yang sudah tua dan mengharapkan untuk bisa kembali ke Indonesia. Soeharto membuka kemungkinan untuk mengizinkan Eksil Indonesia pulang, namun Soeharto menegaskan mereka untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di depan pengadilan terlebih dahulu. Nurhadi¹³⁰ mengatakan Eksil Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai Golongan B. Golongan B dalam buku putih yang dikeluarkan oleh Komando Operasi Pemulihan

¹²⁷ David T. Hill. *op cit* hlm 362

¹²⁸ Sobron Aidit, *Buku yang Dipenjarakan: Memoar Orang Terbuang*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia. 2006, hlm 35

¹²⁹ Bambang Alfared Sipayung. *op cit* hlm 25

¹³⁰ Kepala Pusat Penerangan ABRI Brigjen

Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) merupakan mereka yang nyata terlibat secara tidak langsung dalam peristiwa G30S. Eksil Indonesia sendiri tidak tahu menahu tentang peristiwa G30S, maka tidak mungkin mereka tersangkut dalam G30S, posisi alibi mereka terhadap pemerintahan Sukarno yang pada saat itu merupakan pemerintahan yang sah tidak dapat dijadikan dasar untuk pencabutan paspor mereka.

Kebanyakan Eksil Indonesia memilih untuk menikah dengan orang setempat dan membangun keluarga di negara yang mereka tinggali. Menikah dengan orang setempat akan membantu Eksil Indonesia mendapatkan kewarganegaraan yang kemudian membuat mereka mendapatkan perlindungan, pekerjaan, serta hak-hak bernegara lainnya. Eksil Indonesia yang lain memilih untuk mendapatkan izin tinggal jangka panjang saja karena mereka terus berharap bisa mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia mereka di masa depan. Mereka berharap dapat melakukan perjalanan dengan paspor Indonesia, dapat memberikan suara dalam pemilu, dan mencalonkan diri untuk jabatan politik jika mereka memilih untuk melakukannya.¹³¹ Banyak di antara Eksil Indonesia yang tidak mempunyai cita-cita untuk membangun karir intelektualnya di luar negeri, mereka selalu membayangkan akan kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studinya sebagai babak akhir, namun keputusan untuk tetap berada di luar negeri merupakan hasil perundingan yang berat dengan mitrannya yang umumnya juga bergelar sarjana.¹³²

¹³¹ Vanessa Hearman. *op cit* hlm 95

¹³² Inditian Latifa, *Citizenship as Experience: the Lives and Labours of Overseas Indonesian Scholars*. *International Review of Humanities Studies*. Volume 4, No. 1, 2023, hlm 88

Ibrahim Isa menjelaskan bahwa untuk masalah Eksil kita masih bisa belajar dari orang Belanda. Joris Ivens yang merupakan seorang Sineas Belanda pada tahun-tahun perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan Belanda memproduksi film berjudul “Indonesia Calling” yang menyokong perjuangan kemerdekaan Indonesia. Joris Ivens kemudian dianggap sebagai pengkhianat dan kewarganegaraan Belandanya dicabut. Joris Ivens pindah ke Paris. Pemerintahan Belanda kemudian mengoreksi kesalahannya pada akhir tahun delapan puluhan dan mengirimkan menteri kebudayaan Elco Brinkman ke Paris untuk menemui Joris Ivens dan menyatakan bahwa sikap pemerintah Belanda dulu itu salah. Kewarganegaraan Belanda Joris Ivens selanjutnya dipulihkan dan ia mendapatkan tanda penghargaan pemerintah.¹³³

¹³³ Ibrahim Isa. *op cit* hlm 201